

**MATRIKS DISKUSI ISU STRATEGIS PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH
KELOMPOK I WILAYAH SUMATERA – BALI- NUSTRA
JAKARTA, SEPTEMBER 2016**

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
I	TATA NIAGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK	<ul style="list-style-type: none"> • PEMANFAATAN PASAR YANG OPTIMAL • SISTEM LOGISTIK YANG MEMADAI. • PEMANFAATAN TI DALAM PEMBENTUKAN HARGA • AKSES PEDAGANG TERHADAP PRODUSEN. • MANAJEMEN RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT). • TIDAK ADA PRAKTEK RENT SEEKING/KARTEL. • PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGAWASI DISTRIBUSI BAHAN KEBUTUHAN POKOK • KEBIJAKAN IMPORT TERHADAP BAHAN KEBUTUHAN POKOK YANG LEBIH TRANSPARAN DAN 	<ul style="list-style-type: none"> • KONDISI PASAR RAKYAT YANG ADA DALAM KEADAAN TIDAK MEMADAI SARANA DAN PRASARANANYA. • LEMAHNYA SISTEM LOGISTIC • BELUM SEMUA KABUPATEN/KOTA MEMILIKI PAPAN INFORMASI HARGA DI PASAR RAKYAT. • PANJANGNYA RANTAI TATA NIAGA. • BELUM ADA SISTEM MANAJEMEN RANTAI PASOK. • MASIH TERDAPAT SISTEM KARTEL. • BELUM MAKSIMALNYA PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK DARI PEMERINTAH DAERAH. • IMPOR MASIH DILAKUKAN PADA MASA PANEN • MARAKNYA BAHAN POKOK IMPOR 	<ul style="list-style-type: none"> • REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG BER-SNI. • PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LOGISTIK, DI ANTARANYA PERGUDANGAN YANG MODERN DAN FASILITAS TRANSPORTASI YANG MEMADAI. • PENYEDIAAN PAPAN INFORMASI HARGA DI SELURUH PASAR RAKYAT • PEMBUATAN PASAR LELANG • PEMBENTUKAN BUMD • MEMAKSIMALKAN PERAN TOKO TANI. • MEMAKSIMALKAN PERAN RUMAH PANGAN KITA • PEMBUATAN REGULASI MANAJEMEN RANTAI PASOK. • PENGAWASAN TERPADU DARI INSTANSI TERKAIT. • PENINGKATAN PENGAWASAN

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
		BERKEADILAN <ul style="list-style-type: none"> • SISTEM PEMASARAN YANG EFISIEN 	ILEGAL YANG MASUK <ul style="list-style-type: none"> • MASIH ADA PUNGUTAN LIAR PADA JALUR DISTRIBUSI 	DISTRIBUSI BAHAN POKOK DARI PEMERINTAH DAERAH <ul style="list-style-type: none"> • PENGENDALIAN IMPOR YANG DISESUAIKAN DENGAN MASA PANEN • USULAN AGAR BARANG IMPOR ILEGAL, TERKHUSUS UNTUK BAHAN POKOK PENTING AGAR DAPAT DIMANFAATKAN/DIHIBAHKAN DAN DIDUKUNG OLEH PERATURAN • PENINGKATAN PENGAWASAN OLEH APARAT HUKUM
II	ALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI	<ul style="list-style-type: none"> • SEMUA PEMERINTAH DAERAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK YANG CUKUP DALAM APBDNYA, MISALNYA MENGANGGARKAN CPP, DANA STABILISASI HARGA, PENYERTAAN MODAL DALAM BUMD PANGAN, PEMBANGUNAN (TERMASUK 	<ul style="list-style-type: none"> • FISKAL DAERAH TERBATAS • PROGRAM PENGENDALIAN HARGA MASIH BELUM TEPAT SASARAN SEHINGGA PENGGUNAAN ANGGARAN MENJADI KURANG OPTIMAL. • KOMITMEN YANG KURANG KUAT DARI SATU PIHAK DALAM PELAKSANAAN KAD. 	<ul style="list-style-type: none"> • MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH ANTARA LAIN MELALUI PENINGKATAN PAD, MISALNYA : OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI SISTEM ONLINE. • MENGALOKASIKAN PAGU ANGGARAN (APBD) YANG MEMADAI UNTUK MASING-MASING DAERAH DALAM PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI. DALAM HAL INI PEMERINTAH PUSAT JUGA PERLU MEMBERIKAN PERHATIAN

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
		PEMELIHARAAN) INFRASTRUKTUR, DLL		<p>LEBIH DALAM BENTUK PENINGKATAN PENYEDIAAN ANGGARAN PUSAT KE DAERAH (DANA ALOKASI KHUSUS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERLU REGULASI YANG MENGATUR PENGANGGARAN DALAM APBD UNTUK PEMBERIAN SUBSIDI DALAM STABILISASI HARGA • MELAKUKAN SINERGI PROGRAM-PROGRAM PARSIAL DI MASING-MASING SKPD YANG MEMILIKI KETERBATASAN ANGGARAN SEHINGGA DAPAT TERLAKSANA PROGRAM-PROGRAM SKALA BESAR YANG LEBIH EFEKTIF DAN MEMILIKI DAMPAK BESAR TERHADAP PENGENDALIAN INFLASI. CONTOH: KERJASAMA DALAM MELAKUKAN OPERASI PASAR ATAU PASAR MURAH SKALA BESAR. • PEMDA DISARANKAN UNTUK MEMILIKI BUMD SEBAGAI PENYANGGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK. BAGI PEMERINTAH

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
				<p>DAERAH YANG BELUM MEMILIKI BUMD DAPAT MELIBATKAN PERUSAHAAN LOKAL (SWASTA) DENGAN PEMBERIAN INSENTIF , MISALNYA : KEMUDAHAN PERIZINAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DLL.</p>
III	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PANGAN.	<ul style="list-style-type: none"> • SETIAP DAERAH MEMILIKI INFRASTRUKTUR PANGAN DAN PENUNJANG YANG CUKUP MEMADAI DAN TERMANFAATKAN SECARA OPTIMAL UNTUK MENUNJANG KELANCARAN RANTAI DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN PASOKAN (PASAR, PELABUHAN, BANDARA, TERMINAL, IRIGASI, GUDANG, AKSES JALAN). 	<ul style="list-style-type: none"> • BELUM ADANYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PERSATUAN PERPADI . • TERTINGGALNYA TEKHNOLOGI PENGELOLAAN PADI. • MASIH ADANYA KENDALA DALAM PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR YANG TELAH ADA. 	<ul style="list-style-type: none"> • PERLU PENGUATAN KELEMBAGAAN PERPADI. • PERLUNYA MODERNISASI DALAM USAHA PENGELOLAAN MESIN PADI. • PENGUATAN INFRASTRUKTUR AGRO INDUSTRY, MEMBUKA JALUR TRANSPORTASI HASIL PRODUKSI, MEMBANGUN COLD STORAGE DIMASING-MASING K/K.

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
IV	PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN	<ul style="list-style-type: none"> • REALISASI ANGGARAN TIDAK SELALU TERKONSENTRASI DI AKHIR TAHUN dan REALISASI ANGGARAN LEBIH TERENCANA DENGAN ADANYA TARGET-TARGET DAN RENCANA AKSI MASING-MASING SKPD SETIAP BULAN/TRIWULAN • POSTUR APBD IDEALNYA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YAITU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KEDAULATAN PANGAN, DLL 	<ul style="list-style-type: none"> • TEDAPAT KERAGU-RAGUAN APARAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARENA PEMAHAMAN TERHADAP REGULASI TERBATAS. • INFORMASI SERTA DISTRIBUSI PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN DARI PUSAT TERLAMBAT. 	<ul style="list-style-type: none"> • TPID BERKOORDINASI DENGAN TP4D SERTA SKPD TERKAIT SECARA JELAS SEHINGGA MENAMBAH KEYAKINAN PELAKSANAAN PROGRAM. • K/L TERKAIT AGAR DAPAT MEMPERCEPAT PENERBITAN JUKLAK/JUKNIS PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN DANA APBN.

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
V	TEROBOSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA	<ul style="list-style-type: none"> • TIAP DAERAH MEMILIKI PROGRAM KERJA YANG LANGSUNG MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB INFLASI SESUAI KARAKTERISTIK DAN KAPASITAS MASING-MASING DAERAH • BANYAK TERDAPAT FASILITAS ATAU KANAL YANG BISA DIMANFAATKAN DALAM RANGKA MENYUSUN PROGRAM KERJA, MISAL PENGGUNAKAN TI, FASILITAS PEMERINTAH, APBD, OPTIMALISASI PENGGUNAAN/PEMBENTUKAN BUMD, PENGGUNAAN SILPA 		

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
VI	KESELARASAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INFLASI	<ul style="list-style-type: none"> • TIAP DAERAH MEMILIKI PROGRAM KERJA YANG LANGSUNG MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB INFLASI SESUAI KARAKTERISTIK DAN KAPASITAS MASING-MASING DAERAH. • BANYAK TERDAPAT FASILITAS ATAU KANAL YANG BISA DIMANFAATKAN DALAM RANGKA MENYUSUN PROGRAM KERJA, MISAL PENGGUNAAN TI, FASILITAS PEMERINTAH, APBD, OPTIMALISASI PENGGUNAAN/PEMBENTUKAN BUMD, PENGGUNAAN SILPA • ADANYA DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM/ANGGARAN YANG MENJADIKAN INFLASI SEBAGAI SALAH SATU TARGET. • ADANYA KESELARASAN 	<ul style="list-style-type: none"> • BELUM SEMUA DAERAH MEMILIKI PROGRAM KERJA YANG LANGSUNG MENGATASI INFLASI DISEBABKAN KETERBATASAN REGULASI DAN DANA. • BELUM BANYAK DIBERDAYAKAN FASILITAS KANAL/ SALURAN KARENA KETERBATASAN JARINGAN TELKOM. • PEMANFAATAN BUMD BELUM MAKSIMAL. • TIDAK SEMUA DAERAH KABUPATEN/ KOTA MENGHITUNG IHK. • KURANGNYA PEMAHAMAN KAITAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN TINGKAT INFLASI YANG TERJAGA. • BELUM TERCIPTANYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI PROGRAM KERJA ANTAR SKPD. • BELUM SEMUA DAERAH MEMILIKI TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SASARAN INFLASI 	<ul style="list-style-type: none"> • REGULASI OLEH PEMERINTAH PUSAT. • DUKUNGAN DANA DARI PUSAT MELALUI TUGAS PEMBANTUAN. • PENGENDALIAN HARGA TIKET PESAWAT PADA MOMENT TERTENTU. • TINGKATKAN PERAN ASOSIASI PEDAGANGAN. • BANGUN JARINGAN TELKOM YANG MENJANGKAU SELURUH INDONESIA. • BANGUN BUMD YANG SEHAT DENGAN DUKUNGAN DANA DAN SUMBER DAYA. • PERLU PENAMBAHAN KABUPATEN/ KOTA SEBAGAI SAMPEL INFLASI. • DALAM MENYUSUN SASARAN PEMBANGUNAN AGAR MEMASUKKAN TINGKAT INFLASI SEBAGAI SALAH SATU TOLAK UKUR, SELAIN PERTUMBUHAN EKONOMI. • MERUMUSKAN SASARAN INFLASI DAERAH DALAM RJPMD.

NO	ISU STRATEGIS	KONDISI IDEAL	PERMASALAHAN/KONDISI SAAT INI/HAMBATAN	KESEPAKATAN PROGRAM KERJA TPID
		PROGRAM-PROGRAM KERJA ANTAR SKPD MAUPUN ANGGARAN	<p>YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • BELUM TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA ANTAR SKPD DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH • FOKUS PROGRAM KERJA SKPD MASIH TERFOKUS PADA PERTUMBUHAN EKONOMI SEMATA, BELUM BANYAK MENYENTUH PENGENDALIAN INFLASI. 	<ul style="list-style-type: none"> • TPID DIKUTSERTAKAN DAN BERPERAN AKTIF DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH • PERLU MELAKUKAN SOSIALISASI TERKAIT PENGENDALIAN INFLASI KEPADA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT SECARA KONSISTEN.
VII	PERATURAN PERUNDANGAN YANG DIANGGAP MENGHAMBAT (PUSAT DAN DAERAH) DALAM RANGKA UPAYA KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN BARANG	<ul style="list-style-type: none"> • PERATURAN PERUNDANGAN TERSOSIALISASIKAN KE PIHAK YANG BERKEPENTINGAN 	<ul style="list-style-type: none"> • PERATURAN BELUM TERSOSIALISASI ATURAN TERKAIT DENGAN UPAYA KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN BARANG DARI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT. 	<ul style="list-style-type: none"> • ATURAN KEMENTERIAN/ KELEMBAGAAN YANG MENGATUR KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN BARANG PERLU DISOSIALISASIKAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN.